KETIKA SYARIAH DIJUAL MURAH
“ MEMBEDAH KASUS BMT BERMASALAH”
Oleh : M. Ridwan¹

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) apapun bentuknya (bank, BMT, asuransi dan lain-lain) merupakan wujud manifestasi umat atas penerapan konsepsi muamalah khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi merupakan sisi kehidupan yang sangat vital, karenanya diskursus ekonomi pada hakekatnya berbicara persoalan umat yang amat esensial. Oleh karenanya hasanah muamalah dalam konstruksi sosial sesungguhnya sangat dinamis.

LKS karena bagian dari sisi ekonomi berdasarkan syariah dituntut mampu menampilkan wajah (*performance*) yang ideal tidak saja pada dataran gagasan atau nilai tetapi juga pada wilayah praktek. Artinya, pada dataran nilai, sistem ekonomi islam itu relatif tidak banyak perdebatan, tetapi pada dataran praktek, masih sangat banyak kalangan yang mempertanyakan. Karena itulah maka Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN inilah yang berwenang menetapkan sistem keuangan yang berdasarkan syariah islam. Ketetapan DSN dalam bentuk fatwa bersifat mengikat bagi lembaga keuangan syariah. Untuk mengawal praktek syariah, maka pada setiap lembaga keuangan wajib dibentuk dewan pengawas syariah (DPS). Peran DPS sesungguhnya sangat strategis, karena dapat meningkatkan citra lembaga keuangan tersebut.

BMT hadir sebagai alternatif yang sangat strategis terutama pada sektor keuangan. Kehadirannya tidak saja sebagai wujud atas

¹ Penulis adalah Wakil Ketua Absindo Pusat dan Pembina Absindo DIY dan Direktur BMT BIF.

pengamalan ajaran islam dalam bidang muamalah, tetapi sekaligus pengamalan atas ajaran memberdayakan orang kecil, miskin, dua-fa-mustad'afin dimana bank syariah tidak mampu menjangkaunya. Dua alasan inilah yang mendorong tumbuh dan berkembangnya BMT dimana-mana. Makalah ini hanya akan berbicara persoalan BMT, mengingat lembaga ini tumbuh subur tetapi rentan terhadap masalah, bahkan belakangan ini ada beberapa BMT yang berurusan dengan pihak kepolisian.

Problematika Operasional BMT

Semua bisnis pasti akan menghadapi persoalan, begitu juga yang terjadi pada BMT. Karena BMT terlanjur menggunakan sistem syariah, maka tantangannya semakin besar. Problematika BMT bisa dibagi menjadi dua yakni idiologis dan teknis. Problem idiologis lebih melihat BMT dari perspektif ide dasar dan landasan didirikannya sedangkan problem teknis menyangkut tetakelola/manajemen BMT.

1. *Problem idiologis*. Dibalik tingginya komitmen pengembangan BMT, ternyata ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan peluang ini sebagai lahan bisnis yang menyimpang. Penyimpangan ini terjadi tidak saja pada wilayah teknis operasional, tetapi justru berangkat dari idiologi yang salah. *Nawaitu* pendirian BMT tersebut telah jauh dari nilai-nilai luhur yang mendasari gerakan BMT. Berangkat dari pengalaman BMT yang bermasalah khususnya di DIY, maka dapat dipetakan pangkal permasalahannya secara idiologis sebagai berikut;
 - a. *Kurangnya pemahaman BMT*. Pendirian BMT telah kehilangan akar ruhiyahnya, hal ini disebabkan karena melihat BMT hanya dari perspektif bisnis. BMT yang mestinya untuk melayani masyarakat kecil dan miskin, tetapi justru dijadikan media untuk memupuk modal bagi usaha groupnya dan atau pengurusnya.

- b. *Lemahnya komitmen syariah.* Ketinggian nilai syariah, sekedar dijadikan kedok untuk menarik simpati masyarakat, padahal praktek BMT tersebut sangat jauh dari nilai-nilai syariah. Bagi hasil yang semestinya menjadi salah satu ukuran sistem syariah, telah diputarbalikkan menjadi mesin uang untuk kepentingan funding.
2. *Problem Teknis.* Beberapa problem teknis yang dihadapi BMT antara lain:
 - a. *Lemahnya pengawasan.* Secara internal, BMT telah memiliki dua pengawas yang instruktif kepada pengurus, yakni pengawas manajemen dan syariah. Dua pengawas internal ini memegang peran yang sangat penting. Pengawas manajemen berfungsi melakukan pengawasan dibidang keuangan, manajemen dan operasional pada umumnya, sedangkan pengawas syariah mengawasi pada aspek kepatuhan syariah. Namun pada kasus BMT bermasalah, dua pengawas ini tidak banyak berperan. Disamping pengawas internal, BMT sebagai koperasi memiliki pengawas eksternal yang sekaligus pembina, yakni dinas koperasi. Patut disayangkan, karena fungsi pengawasan dinas koperasi kepada BMT dan koperasi pada umumnya juga sangat kurang.
 - b. *Prolem legal.* Problematika aspek legal terletak pada proses perizinan koperasi tersebut. Beberapa BMT bermasalah di DIY, memiliki badan hukum nasional, karenanya perizinannya dikeluarkan oleh menteri koperasi. Pada umumnya proses pengurusan perizinan hanya berdasarkan pada aspek administratif sehingga kurang menyentuh pada ranah nilai-nilai yang mendasari pendiriannya bahkan ada indikasi praktek kolusi.
 - c. *Kemampuan SDM.* Pada umumnya pendirian BMT tidak mempedulikan kualifikasi SDM, sehingga banyak BMT yang lahir tetapi tidak mampu tumbuh atau tumbuh tetapi

bermasalah. Pelatihan BMT yang ada kecenderungannya semakin pragmatis. Banyak institusi yang menawarkan pelatihan BMT, padahal mereka tidak memahami nilai-nilai ruhiyah yang mendasari gerakan ini, sehingga alumnya juga tidak semakin baik.

Saran Perbaikan

Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan pada umumnya. Jangan sampai terjebak pada pragmatisme bisnis. Jangan hanya dengan penawaran tingkat bagi hasil, margin atau bunga yang tinggi, menjadi alasan berinvestasi. Justru dengan penawaran yang tinggi, mestinya membuat kita lebih waspada. Secara teoritis, lembaga keuangan manapun akan menaikkan bunga atau bagi hasil, sekedar untuk menarik investasi, padahal disinilah masalahnya. Lembaga tersebut sesungguhnya sedang bermasalah pada aspek likuiditas. Bagi gerakan BMT, hendaknya syariah tidak diperjualbelikan dengan harga yang murah atau sekedar dijadikan media promosi untuk mengelabui masyarakat, padahal sesungguhnya prakteknya jauh dari nilai syariah. Bukankah Allah SWT telah melarang umatnya untuk menjual ayat-ayat-Nya dengan harga yang renah/murah (QS. Al Baqarah-41).

Bagi pemerintah dalam hal ini dinas koperasi, hendaknya dalam setiap proses perizinan koperasi tidak terjebak hanya pada wilayah administratif saja, tetapi lebih jauh masuk pada ranah nilai-nilai atau motivasinya dan menciptakan sistem pengawasan yang baik. Semoga kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Bukankah kita juga mungkin bermasalah?